

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi implementasi kurikulum PPG SD dalam jabatan di UPI dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Kriteria atau standar yang digunakan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait PPG Dalam Jabatan. Berdasarkan temuan dan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa dalam implementasi kurikulum PPG SD Dalam Jabatan di UPI sudah banyak yang sesuai dengan aturan pemerintah, akan tetapi ada pula yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini menjadi dua bagian mencakup simpulan umum dan simpulan khusus.

Secara umum implementasi PPG Dalam Jabatan di Indonesia fungsinya masih sama dengan PPG Pra Jabatan yaitu sebagai cara guru untuk memperoleh sertifikat pendidik. Perbedaan utamanya terletak pada sasaran guru dan kurikulumnya. Konsep ini harus diluruskan dan diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih yang secara bersamaan tujuan keduanya sama-sama untuk memperoleh sertifikat pendidik. Pra Jabatan diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum diakui sebagai profesional, sedangkan Dalam Jabatan hendaknya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan masih harus mendapat penyegaran kompetensi secara berkelanjutan.

Kenyataan yang saat ini terjadi di lapangan, PPG Dalam Jabatan yang durasi waktunya lebih singkat dibanding PPG Pra Jabatan tidak dapat mengakomodir kompetensi guru secara keseluruhan. Semua Responden menyatakan bahwa waktu yang disediakan tidak mencukupi untuk penguasaan empat kompetensi guru, dan hanya ditekankan pada aspek pedagogik dan profesionalnya saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa durasi

waktu pelaksanaan PPG Dalam Jabatan akan lebih relevan jika diperuntukkan bagi penguatan dan bukan syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik, sehingga bagi guru yang belum memperoleh sertifikat pendidik hanya bisa melalui satu pintu saja yakni PPG Pra Jabatan. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perekrutan guru ke depannya.

Sementara itu Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang ditetapkan oleh pemerintah pun tidak cukup adil bagi guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdikan. Dalam aturannya baik guru yang baru diangkat menjadi guru Dalam Jabatan (6 tahun mengajar) dengan guru yang sudah puluhan tahun mengajar tetap direkognisi sebanyak 24 SKS. Dalam penelitian lain disebutkan bahwa lamanya masa kerja guru turut berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru (Indrawati, 2013; Burhaein, 2020), artinya semakin banyak pengalaman mengajar guru, semakin meningkat pula kompetensinya. Banyaknya pengalaman mengajar yang dimiliki oleh guru Dalam Jabatan seharusnya bisa meringankan guru dari beban belajar yang harus diampunya. Namun kembali lagi pada konsep awal, selama guru tersebut belum memiliki sertifikat pendidik maka ia bisa memperolehnya melalui PPG Pra Jabatan, sedangkan Dalam Jabatan diperuntukkan bagi yang sudah memiliki sertifikat dengan tujuan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi PPG Dalam Jabatan di Indonesia sangat kompleks karena banyak elemen yang terlibat seperti kebijakan, dan pihak-pihak yang berperan. Perbaikan PPG Dalam Jabatan tidak hanya bisa dilakukan di PPG nya saja tapi juga sampai kepada kebijakan-kebijakan yang berlaku, sebab PPG merupakan produk dari kebijakan tersebut.

Adapun model evaluasi CIPP yang digunakan pada penelitian ini sangat baik untuk menggali aspek-aspek terpenting dari suatu program. Peneliti tidak hanya mengungkap satu sisi saja tapi juga dari berbagai sisi yang jarang dibahas oleh model evaluasi lain. Dari mulai latar belakang dan tujuan suatu program diselenggarakan (konteks), sumber daya yang ikut

membantu keberlangsungan program (input), implementasi program (proses), sampai pada hasil dari program yang telah berjalan (produk). Keseluruhannya memberikan informasi secara utuh dan konsekuen. Masing-masing komponen saling mendukung satu sama lain. Namun yang harus diperhatikan saat menggunakan model evaluasi ini yaitu kejelasan dari batasan permasalahan, karena sifatnya yang fleksibel membuat informasi yang diperoleh menjadi tidak terbatas. Selain itu, pentingnya pemahaman peneliti terhadap objek yang akan diteliti menjadi poin utama yang harus dimiliki peneliti sebelum melakukan evaluasi menggunakan model CIPP. Dengan pemahaman yang mendalam maka model CIPP ini bisa digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Kekurangan dari model CIPP yang harus dikembangkan yaitu dalam aspek luaran, karena CIPP tidak menjelaskan kelanjutan dan produk yang dihasilkan oleh suatu program dan keterserapannya di lapangan. Dengan demikian akan lebih komprehensif apabila komponen CIPP ditambah dengan luaran (*Output*) sehingga menjadi CIPPO. Hal ini bisa menjadi rekomendasi bagi peneliti yang akan melakukan evaluasi dengan menggunakan model ini ke depannya.

Sementara itu simpulan khusus dari penelitian ini diantaranya yaitu:

#### 1. Aspek Konteks

Aspek konteks dalam implementasi kurikulum PPG SD Dalam Jabatan di UPI sudah sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah, akan tetapi dalam beberapa hal masih ditemukan adanya kekurangan. Kesesuaian tersebut dapat terlihat pada: akreditasi; prodi yang dibuka relevan; penempatan PPG secara kelembagaan; struktur organisasi beserta perangkat yang ikut berkontribusi; kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang mendukung. Adapun beberapa hal yang masih belum sesuai yaitu masih ditemukan ketidakdisiplinan baik dari mahasiswa, maupun dosen dalam melaksanakan tugasnya, ditemukan ketidakjujuran dari mahasiswa dan tindakan plagiarisme dan pemberian sanksi yang belum cukup tegas.

#### 2. Aspek Input

Aspek input dalam implementasi kurikulum PPG SD Dalam Jabatan di UPI sudah sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah, akan tetapi dalam beberapa hal masih ditemukan adanya kekurangan. Kesesuaian tersebut dapat terlihat pada: jumlah dan kualifikasi dosen dan guru pamong, sistem rekrutmen dosen dan guru pamong, penerapan prinsip keadilan dan objektif, jumlah mahasiswa dalam satu rombel, penerapan kurikulum sesuai, penetapan jadwal relevan dengan aturan, sarana prasarana memadai. Adapun beberapa hal yang masih belum sesuai yaitu ruangan pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan yang terbatas dan belum terorganisir dengan baik, dan tidak ada pengelola asrama khusus PPG Dalam Jabatan di UPI.

### 3. Aspek Proses

Aspek proses dalam implementasi kurikulum PPG SD Dalam Jabatan di UPI sudah sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah, dan tidak ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan kriteria. Kesesuaian tersebut dapat terlihat pada: perencanaan pembelajaran dosen dan guru pamong sesuai, modifikasi oleh dosen dilakukan dengan tidak keluar dari aturan yang ada, teknis pembelajaran sesuai pedoman, penggunaan media dan sumber belajar dalam pembelajaran sudah sesuai, refleksi dan pencatatan setiap perkembangan selalu dilakukan oleh dosen.

### 4. Aspek Produk

Aspek produk dalam implementasi kurikulum PPG SD Dalam Jabatan di UPI sudah sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah, akan tetapi dalam beberapa hal masih ditemukan adanya kekurangan. Kesesuaian tersebut dapat terlihat pada tingkat kelulusan mahasiswa PPG SD Dalam Jabatan di UPI yang sudah tinggi mencapai 94%, nilai Ujian Kinerja mahasiswa rata-rata melampaui KKM, kelulusan Ujian Kinerja sudah cukup tinggi, nilai keaktifan, tugas harian, dan kehadiran sudah baik. Adapun beberapa hal yang masih belum sesuai yaitu terkait penilaian portofolio masih banyak ditemukan kekurangan.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat:

A. Pemerintah

1. Pemerintah harus memaknai kembali konsep PPG dalam jabatan yang seharusnya merupakan bentuk penyegaran bagi mereka yang sudah menjadi guru. Konsep penyegaran tidak lagi memerlukan adanya pendalaman materi dengan beban belajar yang cukup banyak, akan tetapi hanya penekanan pada kompetensi tertentu, dan penguasaan keterampilan baru. Dengan demikian durasi waktu tiga bulan lebih tepat jika ditujukan untuk penyegaran/pengulangan. Nama mata kuliahnya pun kurang tepat apabila menggunakan istilah pendalaman materi dan seharusnya pengulangan materi. Apabila sifatnya pendalaman maka durasi waktunya pun harus lebih dilonggarkan karena waktu tiga bulan sangat tidak relevan apabila ditujukan untuk pendalaman materi.
2. Agar lulusan PPG dalam jabatan, dan guru-guru yang telah tersertifikasi terjamin kompetensinya, maka Pemerintah sebaiknya membuat program khusus untuk menjamin keterserapan kompetensi guru secara berkala. Program bisa dilaksanakan per 5 tahun ataupun dalam periode tertentu. Hal ini ditujukan agar setelah memperoleh sertifikat pendidik, guru tidak merasa berada di zona nyaman, bisa mempertahankan profesionalitasnya, dan mengembangkan kapasitas diri.

Selain itu dalam penelitian ini pun masih ditemukan banyak kekurangan, sehingga peneliti merekomendasikan untuk penelitian berikutnya beberapa hal yakni berkaitan dengan aspek input komponen guru pamong harus lebih diperdalam, aspek proses dalam pembelajaran PPG SD Dalam Jabatan dirasa masih kurang sehingga untuk berikutnya harus ada penelitian yang secara khusus membahas aspek proses, terkait aspek produk peneliti belum membahas lebih jauh sampai ke keterserapan lulusan PPG SD Dalam Jabatan di sekolah sehingga harus ada penelitian yang khusus untuk membahas keterserapan lulusan PPG UPI di sekolah.